

PERANAN STRATEGIS IKIP DALAM MEMASYARAKATKAN WAWASAN KONSERVASI ALAM DAN LINGKUNGAN DALAM PEMBANGUNAN

Oleh
Suyitno Aloysius

Abstrak

Pembangunan sektor sumber daya manusia memiliki arti yang sangat penting dalam rangka upaya memacu pembangunan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan. Pembangunan manusia bukan sekedar terfokus pada penyiapan tenaga ahli, siap dan terampil sebagai pelaku pembangunan di berbagai bidang, tetapi juga aspek pembangunan wawasan berpikir, yaitu penghayatan pembangunan berwawasan lingkungan. Dari aspek pengembangan wawasan ini, IKIP sebagai lembaga pendidikan guru memiliki fungsi yang sangat strategis sebagai penyelenggara pendidikan konservasi sumber daya dan lingkungan pada masyarakat, khususnya masyarakat calon guru yang pada gilirannya akan berperan sebagai ujung tombak pengembang wawasan tersebut pada masyarakat lebih luas.

IKIP perlu memantapkan kembali program-programnya, baik melalui mata kuliah relevan untuk pendidikan konservasi bagi mahasiswa calon guru maupun program kerjasama dengan pihak lain serta sistem koordinasinya dalam upaya memasyarakatkan wawasan pembangunan pada masyarakat luas.

Pendahuluan

Pembangunan merupakan upaya masyarakat untuk mencapai tingkat mutu hidup yang lebih baik, secara material maupun spiritual. Di dalam upaya ini, manusia berkedudukan sebagai objek sekaligus sebagai subjek pembangunan. Segala daya upaya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidup ini dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam semaksimal mungkin. Karena alam dan lingkungan ini bukan hanya milik satu generasi, maka pembangunan yang mengeksploitasi alam dan lingkungan harus dipertanggungjawabkan pula pada generasi-generasi berikutnya. Untuk itu, dalam pelaksanaan pembangunan harus tetap mengindahkan kelestarian

rian mutu dan potensi sumber daya alam dan lingkungannya. Karena manusia sebagai pelaku pembangunan, maka penyiapan manusia pembangunan yang berwawasan lingkungan menjadi kunci keberhasilan pembangunan berkelanjutan (Sustainable development).

Pembangunan berwawasan lingkungan akan tercapai bila mendapat dukungan dan peran serta seluruh lapisan masyarakat. IKIP (LPTK) merupakan suatu lembaga yang secara langsung maupun tidak langsung berhadapan dengan masyarakat luas, khususnya dalam konteks pembangunan sumber daya manusia pelaku pembangunan. Guru sebagai produk langsung dari pendidikan yang diselenggarakan LPTK merupakan ujung tombak dalam memasyarakatkan wawasan konservasi karena selain guru banyak berhadapan langsung dengan pembangunan generasi muda (masyarakat sekolah), guru masih dianggap salah satu tokoh panutan masyarakat di lingkungannya. Persoalan yang patut dipikirkan adalah menyangkut bagaimana strategi yang ditempuh oleh IKIP sebagai lembaga yang memiliki fungsi strategis dalam memasyarakatkan pembangunan berwawasan lingkungan?

Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Menurut konsepsi yang dituangkan dalam Undang-undang Lingkungan Hidup (UULH) No.4 tahun 1982, pembangunan berwawasan lingkungan diartikan suatu upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya alam secara bijaksana dalam pembangunan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup (Hardjasoemantri, 1989:3). Pembangunan berwawasan lingkungan ini memang merupakan konsekuensi logis dari aspirasi bangsa Indonesia yang telah dituangkan dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 tentang pemanfaatan kekayaan alam yang telah dijabarkan ke dalam GBHN yang menjadi landasan politik pembangunan.

Pada dasarnya, konsep pembangunan berwawasan lingkungan memiliki beberapa makna, di antaranya:

1. Pembangunan yang berpedoman pada prinsip-prinsip konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
2. Pembangunan yang berkelanjutan dengan kesadaran untuk mempertanggungjawabkan pada generasi berikutnya (Salim, 1989:3).

Strategi konservasi dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki empat prinsip pokok, meliputi:

1. Tetap menjamin terpeliharanya potensi sumber daya alam.
2. Tetap menjamin terpeliharanya keanekaragaman jenis dan plasma nutfah.
3. Tetap menjamin terpeliharanya proses-proses ekologis dan sistem pendukung kehidupan.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat (Anonymous, 1989:7).

Konservasi alam dalam pembangunan bukan sekedar mengeksploitasi potensi alam yang ada, tetapi pemanfaatan itu didasari tanggung jawab untuk tetap menjaga kelestarian dan potensi alam. Pembangunan berwawasan lingkungan menempatkan upaya pelestarian sumber daya alam dan isu lingkungan hidup sebagai dampak pembangunan secara terpadu.

Menurut Azis (1987:3), ada empat masalah lingkungan yang menonjol, yakni kemiskinan, berkurangnya potensi sumber daya (depletion), pencemaran dan konservasi kondisi lingkungan. Konservasi merupakan prinsip dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan, tetapi secara teknis konservasi masih merupakan persoalan dalam pelaksanaannya. Konservasi alam harus ditopang oleh perangkat yang memadai, menyangkut kesiapan manusianya, hukum dan mekanisme pengawasannya.

Isu lingkungan hidup dan kerusakan sumber daya alam sudah menjadi masalah global (internasional). Suatu bangsa tidak dapat lagi dengan semena-mena mengeksploitasi alam tanpa mengindahkan kaidah-kaidah konservasi. Masyarakat internasional menjadi semakin peduli terhadap masalah lingkungan di luar kawasan negerinya. Dalam konteks itu, telah dicapai suatu kesepakatan internasional mengenai strategi konservasi alam sedunia yang ditetapkan oleh PBB pada tanggal 15 Desember 1979 (Anonymous, 1989:22).

Secara umum isu masalah lingkungan hidup bersumber dari beberapa faktor, di antaranya:

1. padatnya penduduk di suatu wilayah,
2. kemiskinan dan keterbelakangan,
3. pemerataan pembangunan yang belum merata,
4. kurangnya kesadaran atau pengetahuan masyarakat pada konsep konservasi dalam pembangunan,

5. belum seimbangya IPTEK tentang eksploitasi sumber daya alam dengan IPTEK yang mendukung upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan,
6. adanya pemikiran-pemikiran yang kurang seimbang antara prioritas ekonomi dengan pelestarian sumber daya dan lingkungannya pada kelompok masyarakat industri.

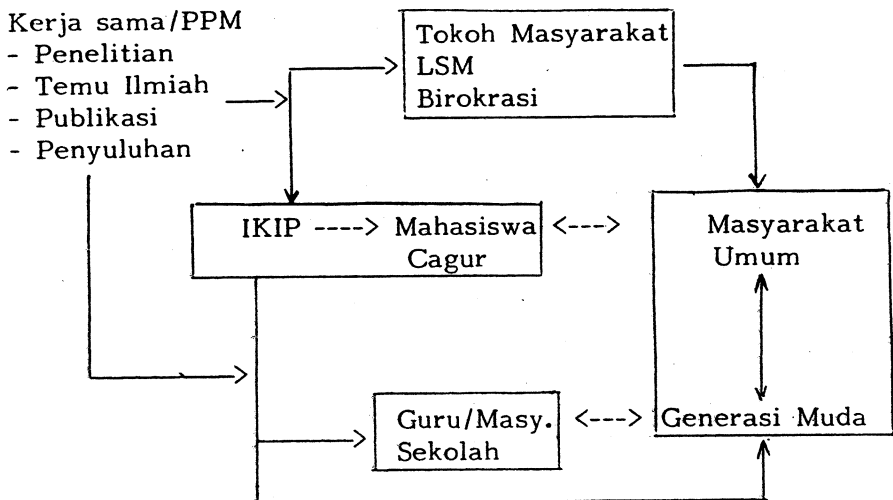
Kedudukan IKIP dalam Pemasarakatan Wawasan Konservasi

Salah satu persoalan menonjol yang menjadi sumber timbulnya masalah lingkungan sebagai dampak pembangunan adalah faktor manusia sebagai pelaku pembangunan. Persoalan tersebut di antaranya:

1. Kurangnya tenaga ahli dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup, khususnya mengenai limbah industri.
2. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai wawasan konservasi dalam pembangunan.

IKIP sebagai lembaga pendidikan memiliki peluang yang sangat luas untuk berperan aktif membangun manusia pembangunan yang berwawasan lingkungan. Secara sederhana, hubungan fungsi antara IKIP dengan masyarakat dalam kaitannya upaya pemasarakatan wawasan konservasi dalam pembangunan tampak seperti pada gambar berikut.

Gambar 1
Hubungan antara IKIP dengan Berbagai-macam
Kelompok Masyarakat



Dari gambaran bentuk hubungan IKIP dengan berbagai kelompok masyarakat menunjukkan besarnya peluang untuk secara aktif berperan serta dalam mengembangkan dan memasyarakatkan wawasan konservasi dalam pembangunan. Di samping itu, karena IKIP memiliki peluang sangat luas untuk berkomunikasi dengan berbagai lapisan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, menunjukkan betapa strategisnya fungsi IKIP dalam membangun wawasan masyarakat sebagai pelaku pembangunan.

Sasaran strategis yang langsung dapat digarap adalah menghasilkan guru yang memiliki wawasan pembangunan yang luas sejalan dengan prinsip dan nilai-nilai konservasi. Pada dasarnya, IKIP mempunyai peluang untuk menjamah berbagai lapisan masyarakat secara langsung, namun dalam jangkauan yang sangat terbatas. Oleh sebab itu, strategi yang ditempuh IKIP hendaknya mampu memanfaatkan setiap peluang untuk optimalisasi pendidikan konservasi dalam berbagai kesempatan dan cara pendekatan, baik langsung maupun tidak langsung, dalam kerangka pembangunan masyarakat berwawasan lingkungan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam konteks penyiapan guru sebagai ujung tombak dalam mengaktualisasikan peran IKIP dalam memasyarakatkan wawasan konservasi maka sebagai konsekuensinya membutuhkan kesiapan yang lebih matang mengenai strategi yang akan ditempuh, menyangkut kurikulum dan penataan isinya, mekanisme dan koordinasinya.

Masalah lingkungan bukan semata milik orang-orang yang berkecimpung langsung dalam matakuliah PKLH atau rumpun bidang biologi. Masalah lingkungan harus didekati dari aspek lingkungan-ekologis, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan bahkan aspek politik. Oleh sebab itu, masalah lingkungan harus dikaji secara interdisipliner dan terpadu. Dengan demikian, pemasyarakatan wawasan lingkungan dalam gerak pembangunan menjadi tanggung jawab bersama.

Isu lingkungan harus dipandang dari berbagai segi sehingga semua bidang studi atau mata kuliah mungkin dapat digunakan untuk mengembangkan wawasan dan nilai-nilai konservasi pada mahasiswa calon guru. Dengan menyadari pentingnya pembinaan wawasan ini, maka tentunya setiap mata kuliah yang memiliki relevansi materi dengan masalah

lingkungan hidup merasa terpanggil untuk mengkaitkan mata kuliah tersebut dengan isu lingkungan hidup. Bahkan dalam batas-batas tertentu sangat mungkin mengintegrasikan suatu mata kuliah yang secara materi tidak terkait langsung dengan masalah lingkungan dengan upaya pengembangan wawasan ini. Sebagai contoh, mata kuliah bahasa, dapat mengangkat problem lingkungan hidup sebagai media dalam mengkaji persoalan kebahasaan.

Selama ini, misi pengembangan wawasan secara umum untuk pendidikan konservasi bagi calon guru lebih banyak dibebankan pada mata kuliah PKLH. Mata kuliah IAD sangat relevan untuk pengembangan wawasan pembangunan telah ditiadakan dalam kurikulum IKIP 1990 walaupun belum sempat menata misi dan substansi materi secara memadai. Masyarakat sekarang telah semakin sadar pentingnya wawasan ini sehingga mata kuliah-mata kuliah yang sangat erat hubungannya dengan pembinaan wawasan ini diberikan bukan saja untuk mahasiswa jurusan Biologi, tetapi bagi jurusan lain yang peta profesinya melibatkan pemikiran wawasan lingkungan seperti pada jurusan Arsitektur, Planologi, Disain Interior, dan sebagainya.

Kendala Pelaksanaan Pendidikan Konservasi

Sebagai lembaga yang akan melakukan fungsi pendidikan konservasi pada masyarakat, terutama calon-calon guru tentu membutuhkan kesiapan program, strategi dan mekanisme, tenaga pengajar yang berwawasan lingkungan dan perangkat kerasnya. Melihat formula kebutuhannya maka kemungkinan bentuk-bentuk hambatan yang masih dijumpai antara lain:

1. Kurangnya jumlah tenaga yang menguasai asas pembangunan berwawasan lingkungan.
2. Adanya persepsi bahwa pengembangan wawasan lingkungan hanya menjadi tanggung jawab pengampu mata kuliah PKLH.
3. Belum ada lembaga yang mengkoordinir dan mengembangkan pendidikan konservasi.
4. Lingkungan atau aktivitas masyarakat kampus yang kurang kondusif menstimulasi aktivitas mahasiswa agar terdorong untuk peduli atau terlibat pada masalah-masalah lingkungan hidup dan pengembangan wawasannya.

Alternatif Pemecahan

1. Pembentukan suatu lembaga di bawah koordinasi lembaga yang membidangi pendidikan, pengajaran dan kemahasiswaan sebagai pengelola dan pengembang program pendidikan konservasi.
2. Mengintegrasikan isu lingkungan hidup dalam setiap jenis mata kuliah, terutama untuk mata kuliah yang relevan atau serumpun.
3. Penataran (penyebarluasan) konsep pembangunan berwawasan lingkungan kepada semua dosen agar semua staf dosen pada akhirnya dapat diminta berperan aktifnya untuk menyisipkan isu lingkungan dalam mata kuliahnya.
4. Mengajak lembaga-lembaga kemahasiswaan (HMJ, SENAT, BPM, atau lembaga kokurikuler lainnya) untuk memasukkan program kegiatan yang menunjang pendidikan konservasi.
5. Pemantapan kurikulum dan silabi mata kuliah yang relevan dengan misi pendidikan konservasi dan pengembangan metoda lebih ke arah problem solving, diskusi atau seminar, klarifikasi nilai.
6. Cara evaluasi bukan sekedar mengukur aspek kognitif, tetapi menekankan pula aspek afektif karena pendidikan konservasi bukan sekedar menanamkan pengetahuan, tetapi lebih terorientasi untuk menumbuhkan nilai-nilai (internalisasi) wawasan pembangunan yang berciri konservasi.
7. Membentuk kelompok pengkaji masalah-masalah lingkungan hidup dan pembangunan yang mengeksploitir sumber alam sebagai lembaga kemahasiswaan tingkat institut karena kajian masalah lingkungan bersifat interdisipliner.
8. Bekerja sama dengan LSM, birokrasi atau tokoh masyarakat melalui forum dialog, temu ilmiah, penyuluhan pada masyarakat atau penelitian.

Penutup

Pembangunan berwawasan lingkungan akan berhasil hanya bila didukung oleh semua lapisan masyarakat, seperti birokrat pengambil kebijakan, masyarakat industri dan masyarakat sekolah, para tokoh masyarakat dan masyarakat pada umumnya. Pemahaman akan prinsip-prinsip konservasi dalam pembangunan sangat perlu bagi seluruh lapisan masyarakat

sebagai pelaku pembangunan. IKIP sebagai lembaga yang memiliki kedudukan sangat strategis dalam pemasyarakatan wawasan pembangunan ini tampaknya perlu mengupayakan pembentukan lembaga pengkajian dan pemasyarakatan lingkungan hidup di tubuh institut ataupun badan-badan kemahasiswaan. Lembaga pengkaji secara instituter ini yang akan merancang program-program kajian, merancang strategi yang ditempuh dalam melakukan pendidikan konservasi bagi mahasiswa dan masyarakat luas sekaligus mengelola koordinasinya dengan lembaga-lembaga intern Kampus dan lembaga di luar kampus yang terkait untuk mengambil langkah-langkahnya, guna optimalisasi peran IKIP dalam pengembalian fungsi pendidikan konservasi.

Daftar Pustaka

- Anonymous. 1990. Seminar dan Lokakarya Pendidikan Konservasi SDA dan lingkungan. Departemen Kehutanan, 1-3 Juli.
- Anonymous. 1989. *Strategi Konservasi Alam Indonesia dan Dunia*. Jakarta: Kantor Ahli Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup.
- Azis, I.J. 1987. *Beberapa Segi Ekonomi dalam Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Simposium 15 Tahun Gerakan Lingkungan Menuju Pembangunan Berwawasan Lingkungan. Jakarta, 5 Juni.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 1987. *Perundang-undangan dan Penegakan Hukum di bidang Lingkungan Hidup*. Simposium 15 Tahun Gerakan Lingkungan Menuju Pembangunan Berwawasan Lingkungan. Jakarta, 5 Juni.
- Salim, Emil. 1987. *Pola Pembangunan Indonesia Berwawasan Lingkungan*. Simposium 15 Tahun Gerakan Lingkungan Menuju Pembangunan Berwawasan Lingkungan. Jakarta, 5 Juni.